

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pemerintah yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum pada persekongkolan dengan pelaku usaha dalam perspektif hukum persaingan usaha.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 memperkuat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU-I/2013 dengan amar putusan diantaranya menyatakan bahwa 19 pelaku usaha bersama Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan menghukum para pelaku usaha untuk membayar denda yang besarnya berbeda-beda untuk setiap pelaku usaha. Akan tetapi Mahkamah Agung, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tidak menghukum Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, padahal Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus melalui studi yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum yang terjadi berdasarkan yurisprudensi putusan. Tekniknya melalui pengumpulan bahan-bahan hukum, yang kemudian diklasifikasikan serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasilnya, Menteri Perdagangan Republik Indonesia bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 1365 jo 1367 KUHPerdata. Sanksi yang dapat dikenakan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia adalah mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya berdasarkan Pasal 1365 jo 1367 KUHPerdata.

Ke depan sebaiknya Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai bagian dari Pemerintah dan sebagai pemegang kebijakan melakukan tindakan seperti meninjau kembali dan merevisi penormaan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan serta memperhatikan dan

melaksanakan saran dan pertimbangan berupa rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan apabila rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan maka dirasa perlu untuk menambahkan aturan lanjut yang memuat sanksi.

Kata kunci: Persekongkolan, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah, Tanggung Jawab Pemerintah, Persaingan Usaha.



ABSTRACT

This research was conducted to analyze how the responsibilities and sanctions that could be imposed on the government were legally proven and were convinced of committing acts against the law in a conspiracy with business actors in the perspective of business competition law.

Decision of the Supreme Court Number 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 strengthens the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 05/KPPU-I/2013 with a ruling including stating that 19 business actors together with the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade The Republic of Indonesia is legally and convincingly proven to violate Article 24 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and to punish business actors for paying fines of varying magnitude for each business actor. However, the Supreme Court, based on the Supreme Court Decision Number 1495 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 did not punish the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, whereas the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia and the Minister of Trade The Republic of Indonesia has been declared legally and convincingly proven to violate Article 24 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

This research is a legal research that uses a normative juridical approach that is analyzing the problem from the perspective of the applicable legislation in the Republic of Indonesia. This research also uses a case approach through studies relating to legal cases that occur based on the jurisprudence of the decision. The technique is through the collection of legal materials, which are then classified and analyzed with qualitative descriptive methods.

As a result, the Minister of Trade of the Republic of Indonesia is responsible for unlawful acts committed by the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia as stipulated in Article 1365 in conjunction with the 1367 Civil Code. Sanctions that can be imposed on the Minister of Trade of the Republic of Indonesia for acts against the law that have been carried out by the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia are to compensate for damages committed by other people who are dependent on Article 1365 in conjunction with 1367 of the Civil Code.

Going forward, the Minister of Trade of the Republic of Indonesia and the Director General of Foreign Trade of the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia as part of the Government and as policy holders take actions such as reviewing and revising the norms contained in the Regulation of the Minister of Trade and taking into account and implementing suggestions and considerations in the form of recommendations from the Commission Business Competition

Supervisor, and if the recommendation is not implemented, it is deemed necessary to add further rules containing sanctions.

*Keywords: Conspiracy, Acts Against Law by the Government,
Government Responsibility, Business Competition.*

